



RANCANGAN AKHIR

RENSTRA

Rencana Strategis

2025 - 2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029. Tujuan disusunnya Renstra adalah untuk digunakan sebagai kerangka acuan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) dalam mendukung program atau misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra OPD ini. Akhirnya Kami berharap semoga Renstra OPD ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 8 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar



IWAN DWI WINARTO, S.T, M.M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19770109 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029. Tujuan disusunnya Renstra adalah untuk digunakan sebagai kerangka acuan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) dalam mendukung program atau misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra OPD ini. Akhirnya Kami berharap semoga Renstra OPD ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 8 September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar

IWAN DWI WINARTO, S.T, M.M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19770109 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat Daerah.....	II-28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,	
DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-1
3.2Strategi dan Arah Kebijakan	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN URUSAN.....	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif	IV-1
4.2Kinerja Penyelenggaraan Urusan	IV-46
BAB V PENUTUP	V-1

Daftar Bagan dan Tabel

1. Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.	II-2
2. Tabel 2.2 Daftar Jabatan, Pangkat, Pendidikan Terakhir dan Diklat Kepemimpinan Tahun 2025	II-10
3. Tabel 2.3. Rincian Aset OPD menurut Kondisi Tahun 2025...	II-12
4. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	II-14
5. Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	II-26
6. Tabel 2.6. Isu Strategis Perangkat Daerah	II-30
7. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup	III-5
8. Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah	III-7
9. Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-8
10. Tabel 4.1. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-2
11. Tabel 4.2. Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan	IV-15
12. Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-42
13. Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	IV-47
14. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup	IV-48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 terdiri dari a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Pembangunan Lingkungan Hidup di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam proses perencanaannya tidak terlepas atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor XXX Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor XXX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor XXX Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor XXX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029;
34. Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar muatan dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menjelaskan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengidentifikasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini disajikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini disajikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif

Pada bagian ini disajikan uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini disajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Sub Bagian ini akan membahas informasi informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menjelaskan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

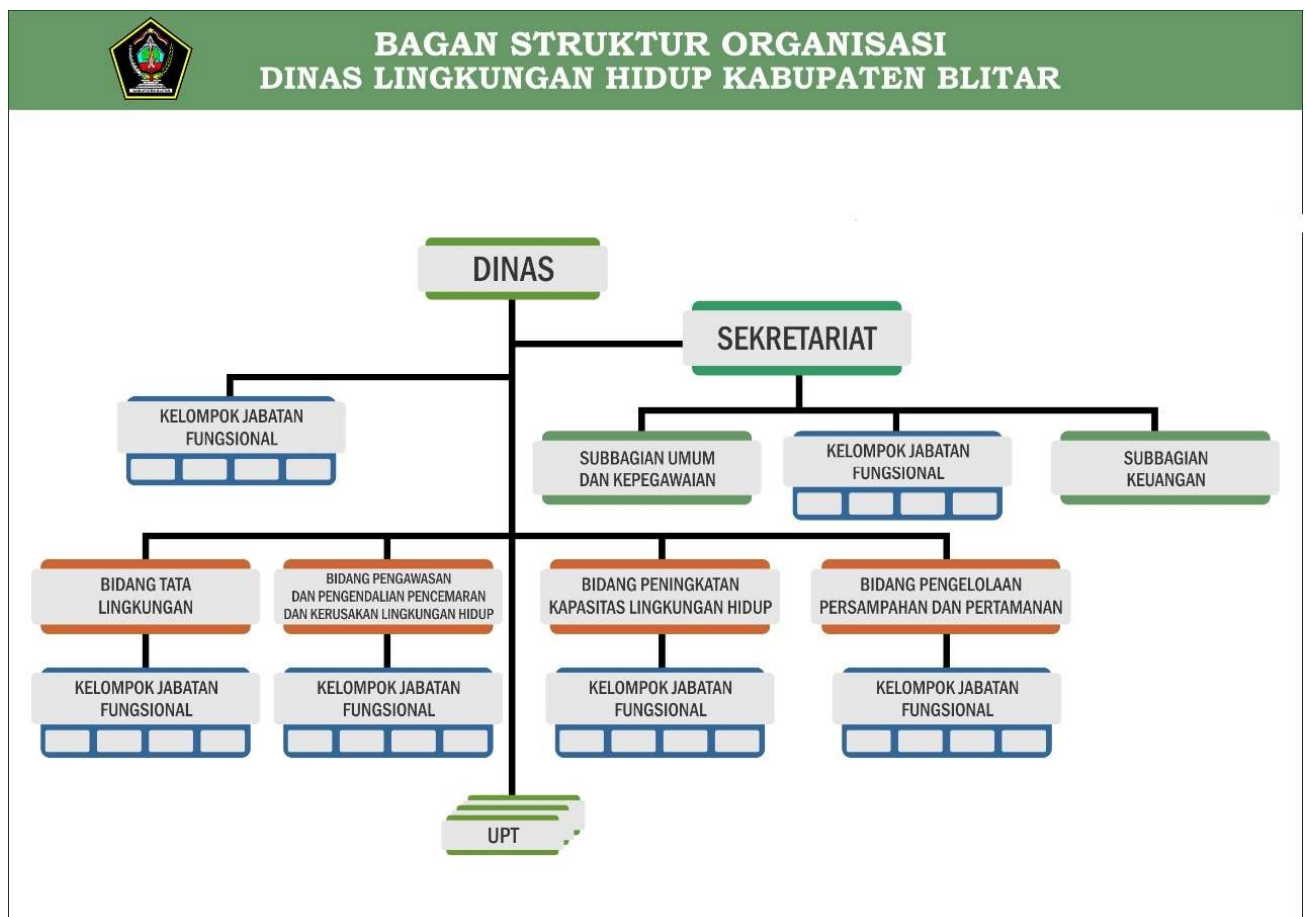
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan serta tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan serta tugas pembantuan.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022.

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLITAR



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

- penetapan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian, konservasi, pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;
- pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
- pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan kerja sama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan, limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
- pembinaan UPT;
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, memverifikasi penyusunan program dan perencanaan Dinas, menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

- b. pengelolaan pelayanan administrasi umum.
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. pengelolaan administrasi keuangan
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan
- f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- k. pengelolaan kearsipan
- l. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana.
- m. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

3) Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistem informasi lingkungan serta publikasi lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya meliputi kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- e. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- f. penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis daerah yang di dalamnya meliputi fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- g. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. penyusunan perencanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- i. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan secara transparan yang terdiri dari tim penilai, tim pakar, dan konsultan;
- j. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- l. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. pelaksanaan pemberian persetujuan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di Daerah;
- o. pelaksanaan pemberian persetujuan dokumen penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengendalian terhadap usaha/kegiatan potensial mencemari atau merusak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. pemantauan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan saran dan prasarana pemantauan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di wilayah Daerah;
- o. memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
- p. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

5) Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

peningkatan kapasitas lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kemitraan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional perlindungan dan konservasi sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam rangka perlindungan dan konservasi sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati;
- c. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga untuk berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan peduli kepada keanekaragaman hayati;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan bencana alam;
- i. pelaksanaan koordinasi konservasi, penetapan dan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana;
- j. pelaksanaan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
- k. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan kemitraan lingkungan;
- m. perlindungan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, kerja sama dan kemitraan dengan individu, kelompok dan lembaga pegiat lingkungan; dan

- o. pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

6) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan kegiatan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e. pembinaan pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- f. koordinasi pemilahan sampah, pengumpulan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- h. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
- j. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- k. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- l. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- m. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- n. melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir sampah;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah pada bank sampah, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir yang dikelola oleh masyarakat atau swasta;
- q. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- r. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- s. mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- t. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- u. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan penataan keindahan dan keasrian perkotaan;
- v. melaksanakan pengembangan taman kota dan hutan kota sebagai taman rekreasi berbasis lingkungan;
- w. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- x. pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan sebuah organisasi dibutuhkan sumber daya yaitu berupa Personil, Peralatan dan perlengkapan sebagai media untuk melaksanakan pelayanan di SKPD tanpa sumber daya maka

pelayanan yang ada di SKPD mustahil dapat dilaksanakan. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2021 terdapat 41 personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Daftar Jabatan, Pangkat, Pendidikan Terakhir dan Diklat
Kepemimpinan Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yg pernah diikuti	Jumlah	
					L	P
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-2	Diklatpim IV, III, II	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2	Diklatpim IV dan III	1	-
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV	-	1
4	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV dan III	1	-
5	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Penata Tk. I (III/d)	S-1	Diklatpim IV	1	-
6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Pembina (IV/a)	S-1	Diklatpim IV dan III	-	1
8	Kepala Sub bagian Keuangan	Penata (III/c)	S-2	-	-	1
9	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Penata Tk I (III/d)	S-2	Diklatpim IV	-	1
10	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV	1	1

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yg pernah diikuti	Jumlah	
					L	P
11	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Penata Tk. I	S-2	Diklatpim IV	-	1
12	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV	-	1
13	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Penata Tk I (III/d)	S-1	-	1	-
14	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV	1	-
15	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-1	Diklatpim IV	1	-
16	Perencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1	-	-	1
17	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-2	-	1	-
18	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1	-	1	2
19	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda (III/a)	S-1	-	-	2
20	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda (III/a)	SMA	-	1	-
21	Penata Layanan Operasional	Penata Muda (III/a)	SMA	-	1	-
22	Penata Layanan Operasional	Penata Muda (III/a)	SMA	-	2	-
23	Pengolah Data dan Informasi	Pengatur Tk I (II c)	D-III	-	-	1
24	Pengelola Layanan Operasional	Pengatur (II c)	SMA	-	1	-
25	Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur (II c)	SMA	-	2	-

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yg pernah diikuti	Jumlah	
					L	P
26	Pemelihara Tumbuhan	Pengatur (II c)	SMA	-	1	-
27	Pemelihara Tumbuhan	Pengatur Muda Tk. I (II b)	SMA	-	1	-
28	Pemelihara Tumbuhan	Pengatur Muda (II a)	SMA	-	1	-
JUMLAH					20	13

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Rincian Aset OPD menurut Kondisi Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Kendaraan Roda Empat	6 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	19 unit	Baik
3.	Kendaraan Roda Tiga	24 unit	Baik
3.	Arm roll Truck	5 unit	Baik
4.	Dump Truck	5 unit	Baik
5.	Truk Tangki	2 unit	Baik
6.	Buldozer	2 unit	1 Baik 1 Tidak Baik
7.	Exavator	1 unit	Baik
8.	Loader	1 unit	Baik
9.	AC	14 unit	Baik
10.	Meja Kerja	61 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
11.	Kursi Kerja dan Rapat	206 unit	Baik
12.	Lemari Kayu	3 unit	Kurang Baik
13.	Lemari Besi	58 unit	Baik
14.	Filling Besi	74 unit	Baik
15.	Brankas	1 unit	Baik
16.	PC	26 unit	Baik
17.	Laptop	40 unit	Baik
18.	Notebook	8 unit	Baik
19.	Printer	50 unit	Baik
20.	Scanner	1 unit	Baik

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1. Dalam melaksanakan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 (empat) indikator kinerja Utama (IKU) untuk dilaksanakan. Dari keempat (4) indikator tersebut rata-rata Rasio Capaian Kinerja sudah tercapai 100%, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Tujuan																
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				64.90	65.45	66.00	65.54	67,17	66,80	64,27	64,64	103,5%	102,06%	97,38%	98,63%
Indikator Kinerja Sasaran																
2	Indeks Kualitas Air				55.1	55.2	55.3	55.4	61,67	60,53	59,41	53,4	111,92%	109,66%	107,43%	96,39%
3	Indeks Kualitas Udara				86.7	86.8	86.91	87.01	87,46	87,63	82,07	88,06	100,88%	100,96%	94,43%	101,21%
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				41.41	43.55	45.69	47.83	39,10	39,08	39,70	40,61	94,42%	89,74%	86,89%	84,90%
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan				79	80	81	82	77,21	80,27	84,97	52,62	97,73%	100,34%	104,90%	64,17%
6	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah				A (80,1)	A (80,2)	A (80,3)	A (80,4)	A	A (81,55)	A (83,41)	BB (70,90)	100%	101,68%	103,87%	88,18
Indikator Kinerja Kunci																
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan				46%	65%	70%	75%	68.63%	30.8%	53%	70.00%	114.38%	47.54%	75.71%	93.33%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:															
	a. Jumlah pengurangan timbulan sampah				65000 ton	67000 ton	69000 ton	71000 ton	62532.62 ton	64315.19 ton	67680.55 ton	7442.76 ton	96.2%	95.99%	98.09%	10.49%
	b. Jumlah penanganan timbulan sampah				56000 ton	57500 ton	59000 ton	60500 ton	56559.49 ton	55534.53 ton	57567.58 ton	81603.56 ton	101%	96.58%	97.57%	134.88%
Indikator Kinerja Program																
9	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun				5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	5%	100%	300%	100%	100%
11	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup															
12	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan				2%	4%	8%	12%	0,05 %	0,05%	0,05%	0,05%	2,5%	1,25%	0,63%	0,42%
13	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				-	-	1%	2%	-	-	1%	2%	-	-	100%	100%
14	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				60%	65%	70%	75%	68,63 %	30,9%	53%	70%	114,38 %	47,54%	75,71%	93,33%
15	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	lingkungan															
16	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup				-	5%	5%	5%	-	5%	3,03%	1%	-	100%	60,60%	20%
17	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan				50%	55%	60%	65%	95,24 %	100%	100%	100%	190,48 %	181,82 %	166,67 %	153,85 %
18	Persentase sampah yang terkelola				79%	80%	81%	82%	77,21 %	80,10 %	84,97 %	58,5%	97,73%	100,13 %	104,90 %	71,34%

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

1. Indeks Kinerja Utama

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 2.1 tersebut Capaian Kinerja Renstra sebelumnya dapat tercapai dengan sangat memuaskan, karena dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 29 Indikator Kinerja Individu (IKI) yang telah ditetapkan kesemuanya dapat tercapai dengan rata-rata di atas 90%, namun untuk indikator Indeks Kualitas Lahan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Blitar, Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar mencapai 27.308,73 Ha yang disebabkan oleh kekeringan akibat musim kemarau dampak pemanasan global dan alih fungsi lahan menyebabkan tidak adanya penambahan yang signifikan terhadap luasan tutupan lahan di Kabupaten Blitar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kualitas air melampaui target yang telah ditetapkan dan berada dalam kategori sedang, namun nilainya mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Beberapa faktor penyebab penurunan tren tersebut antara bertambahnya kegiatan usaha peternakan terutama peternakan sapi perah dan pedaging di sekitar DAS kawasan hulu yang berada di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Doko menyebabkan tingginya parameter biologis yaitu cemaran Fecal Coli; cemaran limbah domestik dari permukiman warga yang berpengaruh signifikan terhadap tingginya parameter Total Phospat; dan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan debit sungai yang berkurang sangat drastis sehingga berimbas pada naiknya temperature air dan beberapa parameter pencemar lainnya karena kurangnya daya dukung dan daya tampung sungai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kualitas udara mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2023 indeks kualitas udara tidak mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor penyebab ketidaktercapaian target antara lain perubahan lokasi titik pantau udara APBN KLHK; penambahan titik pantau udara dari ABPD Kabupaten Blitar; dan letak tiang sampler yang terlalu dekat dengan sumber emisi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan mencapai target yang telah ditetapkan. Angka ini

merupakan komposit dari beberapa indikator yaitu kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, acceptability dan implementasi, capaian target dan kapasitas, efisiensi anggaran, capaian dan target, serta Indeks Kualitas Air. Beberapa faktor penyebab belum maksimalnya pengelolaan sampah terutama dari sector penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain kurangnya sarana dan prasarana persampahan; luasnya wilayah Kabupaten Blitar yang menyebabkan penanganan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi kurang optimal; umur TPA yang semakin berkurang; serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan Nilai SAKIP. Penyebab ketidaktercapaian indikator ini adalah adanya perubahan sistem penilaian SAKIP. Walaupun mengalami penurunan Predikat SAKIP Tahun 2024 berada dalam kategori BB (Sangat Baik).

2. Layanan Bidang Tata Lingkungan

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu pembangunan wilayah. KLHS memuat kajian antara lain: a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; c. Kinerja layanan/jasa ekosistem; d. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan suatu kebijakan, rencana maupun program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. KLHS terdiri dari KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selama periode tahun 2021-2024, telah disusun dokumen KLHS sebagai berikut :

- a. Tahun 2021 : KLHS RTRW
- b. Tahun 2022 : KLHS RDTR Kec. Garum, Kec. Srengat, Kec. Wlingi
- c. Tahun 2023 : KLHS RPJPD
- d. Tahun 2024 : KLHS RPJMD

Faktor pendukung capaian kinerja antara lain tersedianya sumber daya manusia serta anggaran, sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah proses validasi dokumen KLHS dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur membutuhkan proses yang panjang.

Dalam upaya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan berkontribusi dalam penyusunan dokumen IKPLHD dan dokumen hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai upaya preventif pencegahan pencemaran, dengan capaian tiap tahun sebanyak satu dokumen. Faktor pendukung capaian kinerja antara lain adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya media komunikasi yang memadai. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah terbatasnya personel pendukung yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya respon dari OPD terkait dalam pengumpulan database, serta masih belum lengkap, detil dan teratur basis data dasar lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja keras dalam proses pencarian dan pengolahan data.

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat melalui publikasi lingkungan yang melayani dalam penyampaian informasi mengenai lingkungan hidup juga mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat adalah adanya dukungan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta pegiat lingkungan yang aktif meng-upload aktivitas cinta lingkungan dalam publikasi kegiatan di Kabupaten Blitar. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum adanya sarana dan prasarana .

Terkait dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah mencapai target yang ditentukan. Faktor pendukung capaian kinerja pelayanan ini adalah adanya pelayanan yang interaktif (pembinaan, pengarahan) kepada pengusaha penghasil limbah B3. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah masih belum banyak dunia usaha penghasil limbah B3 yang memahami arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan pengajuan permohonan rekomendasi teknis TPS Limbah B3.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

Instrumen ini memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. Namun demikian, sampai saat ini Amdal/UKL/UPL oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dan instansi pengambil keputusan sebagai legitimasi ijin lingkungan atau alasan pengesahan saja, sebagai bagian dari proses perijinan yang harus dilalui. Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka penilaian dokumen lingkungan hidup yang selama ini hanya bermuara pada Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup menjadi Izin Lingkungan. Terintegrasinya izin lingkungan dalam bentuk perizinan

menjadikan komitmen pemrakarsa dokumen AMDAL dan UKL-UPL menjadi jauh lebih kuat ikatannya. Hal ini disebabkan, apabila Pemrakarsa tidak melaksanakan apa yang tercakup dalam izin lingkungan maka dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan izin lingkungan. Pencabutan izin lingkungan akan menyebabkan izin usaha dan/atau kegiatannya dapat dibatalkan.

Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan dan rekomendasi pemberian ijin lingkungan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja pelayanan ini adalah adanya pelayanan yang interaktif (pembinaan, pengarahan) kepada pengusaha. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah masih belum banyak dunia usaha yang memahami arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan dokumen lingkungan, sehingga banyak dunia usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan.

Capaian kinerja untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat mengalami nilai yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan terselenggaranya perlombaan tergantung dari anggaran yang ada. Pada tahun 2022, perlombaan yang dilaksanakan sebanyak 5 jenis lomba, sedangkan pada tahun 2023 dan 2023 hanya bisa dilaksanakan 1 jenis lomba lingkungan hidup.

3. Layanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P3KLH)

Bidang P3KLH mengampu pelayanan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dengan melakukan uji sampling air dan udara. Untuk indikator jumlah pengujian sample baik air dan udara selalu mencapai target yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja adalah tersedianya anggaran untuk melakukan uji sampling dengan pihak ketiga. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah belum berfungsinya laboratorium lingkungan hidup,

sehingga tidak maksimal dalam pemantauan kualitas air dan udara secara rutin.

Layanan kedua yang diampu oleh bidang PKLH adalah kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 3 dokumen untuk setiap tahunnya. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah Pokmaswas, Komunitas Pegiat Lingkungan dan warga masyarakat yang selalu aktif dan kooperatif melaksanakan giat bersih lingkungan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masih adanya pengusaha yang tidak patuh dalam pengelolaan lingkungan.

Untuk pelayanan pengawasan kegiatan / usaha, Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mencapai target yang telah ditentukan untuk tahun 2022 dan 2023. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adanya koordinasi yang baik dengan bidang Tata Lingkungan terkait data rekapitulasi usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan ketersediaan dokumen lingkungan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana belum lengkap, luasnya wilayah cakupan pengawasan, anggaran yang belum sebanding dengan jumlah usaha yang diawasi, beratnya medan pengawasan serta masih terbatasnya fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Selanjutnya indikator Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan selalu mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah adanya regulasi yang mendukung, kepedulian masyarakat semakin meningkat, serta kerja sama yang baik semua personil dalam bidang P3KLH. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum adanya laboratorium lingkungan yang belum difungsikan, kewenangan lintas sektoral seperti pengaduan akibat penambangan pasir dan sirtu yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, serta penegakkan hukum yang masih kurang tegas.

4. Layanan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PKLH)

Bidang PKLH mengampu penanaman dan rehabilitasi lahan serta peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Untuk indikator sub kegiatan penanaman dan rehabilitasi lahan mengalami perubahan indikator. Secara garis besar capaian untuk kegiatan penanaman dan rehabilitasi lahan mencapai target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Layanan pada bidang PKLH mengampu penugasan terkait IPPKH untuk Jalan Lintas Selatan (JLS) dan ganti rugi tegakan atas pohon yang terdampak untuk proyek JLS. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik antar pihak terkait. Sementara kendala yang dihadapi adalah masih luasnya lahan kritis di Kabupaten Blitar, musim kemarau panjang serta kondisi lapangan yang cukup berat.

Untuk Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat selalu mencapai target kinerja setiap tahunnya. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan ini adanya respon yang baik dari semua pihak terkait baik desa / kelurahan serta sekolah. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari OPD lain terkait dalam hal pembinaan, kurangnya minat sekolah, pesantren, maupun desa atau kelurahan untuk mengikuti Adiwiyata, Eco Pesantren, serta Desa / Kelurahan BERSERI.

5. Layanan Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan (PSP)

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan mengampu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan. Untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Luas RTH Publik di Kabupaten Blitar tidak mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024 karena sejak tahun 2021 tidak alokasi anggaran untuk pembangunan taman kota

maupun RTH sehingga luas Taman Kota dan RTH stagnan di angka 7,2 Ha dengan prosentase RTH Publik terhadap luas perkotaan sebesar 0,05%.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan persampahan pada tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2022 dan 2023 mencapai target yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana persampahan seperti truk sampah dan kontainer, luasnya wilayah layanan yaitu 22 kecamatan, kondisi alat berat di TPA yang kurang maksimal penggunaannya karena faktor usia yang sudah tua serta kondisi TPA yang sudah overload.

b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.2. Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan 8 program pada tahun 2021, 9 program pada tahun 2022, dan 10 program pada tahun 2022-2024. Dari semua program tersebut rata-rata Rasio penyerapan anggaran sudah tercapai lebih dari 90%, untuk lebih jelasnya bias dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.5.**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar**

No	Program	Anggaran				Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.887.906.146	5.152.204.080	5.534.491.028	9.037.044.487	4.550.174.597	4.939.445.222	5.190.948.656	8.741.370.752	93,09 %	95,87 %	93,79 %	96,73 %	6.152.911.435,25	5.855.484.806,75
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	170.172.000	216.409.000	160.000.000	300.000.000	152.105.515	215.789.224	159.645.200	299.999.995	89,38 %	99,71 %	99,78 %	100,00 %	211.645.250,00	206.884.983,50
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	553.804.900	3.581.342.61	10.798.042.560	9.881.966.273	547.376.757	2.753.545.023,53	2.313.027.855,90	4.402.003.425	98,84 %	76,89 %	21,42 %	44,55 %	7.077.937.911,00	2.503.988.265,36
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.454.807.100	2.340.593.370	1.687.125.856	867.552.900	1.439.983.372	2.320.295.007	1.605.716.244	784.354.079	98,98 %	99,13 %	95,17 %	90,41 %	1.587.519.806,50	1.537.587.175,50
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	-	-	20.000.000	24.000.000	-	-	19.868.000	23.999.960	-	-	99,34 %	100,00 %	22.000.000,00	21.933.980,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	133.717.500	243.674.930	325.746.055	78.430.615	133.409.000	242.500.298	323.280.760,50	76.592.345	99,77 %	99,52 %	99,24 %	97,66 %	195.392.275,00	193.945.600,88

No	Program	Anggaran				Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)														
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.984.428.800	933.498.340	2.835.964.329	1.801.627.868	2.797.880.815	916.328.931	2.559.248.042	1.741.813.880	93,75 %	98,16 %	90,24 %	96,68 %	2.138.879.834,25	2.003.817.917,00
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	74.082.000	9.334.450	12.678.932	-	73.931.500	9.159.750	12.637.018	-	99,80 %	98,13 %	99,67 %	32.031.794,00	31.909.422,67
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.781.000	20.480.500	25.000.000	25.250.000	20.134.000	20.305.254	24.805.000	24.674.000	96,89 %	99,14 %	99,22 %	97,72 %	22.877.875,00	22.479.563,50
10	Program Pengelolaan Persampahan	3.547.298.557	6.167.399.976	8.009.869.542	2.703.439.085	3.327.612.400	5.865.005.939	7.666.090.247	2.677.052.418	93,81 %	95,10 %	95,71 %	99,02 %	5.107.001.790,00	4.883.940.251,00
	TOTAL	13.752.916.003	18.729.684.812	29.405.573.820	24.731.990.160	12.968.676.456	17.347.146.398,53	19.871.789.755,40	18.784497.872,35	94,30 %	92,62 %	67,58 %	96,73 %		

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

Berdasarkan tabel 2.2, maka perkembangan pemberian anggaran/pendanaan untuk OPD Dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp. 86.620.164.795,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 68.972.110.482,- sehingga Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 79,63%.

Dari beberapa Program yang dilaksanakan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang memiliki rata-rata anggaran yang cukup tinggi adalah Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar konsisten dan sangat serius dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan di Kabupaten Blitar.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengidentifikasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dirumuskan berdasarkan analisis yang terdapat pada Bab II, Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029, dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan ini berfungsi untuk menggambarkan kondisi nyata (realita) yang dapat ditarik kesimpulannya dari kesenjangan antara capaian pembangunan yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan tercapai. Dalam proses perumusan

permasalahan, dapat digunakan kertas kerja untuk mendalami dan memformulasikan isu-isu yang ada. Oleh karena itu, permasalahan yang disajikan dalam sub-bab ini difokuskan pada isu-isu yang bersifat dominan dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memperoleh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
2. Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan
4. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
5. Sudah memiliki Taman Kehati yang ditetapkan dengan SK menteri LHK tahun 2017 namun tidak menjadi prioritas pembangunan
6. Masih kurangnya masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan
7. Masih kurangnya penanganan persampahan
8. Masih kurangnya pengurangan persampahan

2.2.1. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar berdasarkan RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah / lembaga luar negeri, Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penjarangan aspirasi yang dilakukan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Ada 15 kecamatan mempunyai i status daya dukung penyedia udara bersih tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa secara umum kemampuan penyedia udara bersih di Kabupaten Blitar telah mencukupi .	Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penurunan daya dukung lingkungan, khususnya sumber daya air	Perubahan Iklim	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Penurunan kualitas air, kuantitas mata air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan
		Alih fungsi lahan yang berpotensi menurunkan ketahanan pangan dan meningkatkan bencana				Alih fungsi lahan
						Terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya emisi gas rumah kaca

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan					Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
	Masih kurangnya masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan					
	Masih kurangnya cakupan pelayanan persampahan	Pengelolaan sampah				Meningkatnya volume sampah dan limbah

Berdasarkan tabel 3.1 isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah :

1. Penurunan kualitas air, kuantitas mata air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan
2. Alih fungsi lahan
3. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya emisi gas rumah kaca
5. Meningkatnya volume sampah dan limbah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar. Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2025-2029 menentukan VISI **“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”**. Dalam visi tersebut mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor

penggerak , fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Kolaborasi ini akan memperkuat daya saing daerah, menjadikan Kabupaten Blitar lebih "Berdaya" dan pada akhirnya membawa kembali kejayaannya sebagai daerah yang maju dan terkemuka, yang berarti pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja sektor unggulan dapat kembali meningkat sebagaimana kondisi sebelum pandemi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mampu menekan kemiskinan dan pengangguran dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik, berdaya saing, melalui pembangunan keluarga sejahtera dan optimalisasi potensi generasi muda yang siap menyongsong indonesia emas;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha;
3. Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
4. Menjamin ketentraman, ketertiban, ketangguhan bencana serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan

tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya misi yang ke 2 (dua), yaitu Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha. Dari misi tersebut diturunkan dalam tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur secara Komprehensif dan Berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut, dapat digambarkan dalam sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam upaya pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, maka tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dari misi kedua tersebut terperinci sebagai berikut :

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi II: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur secara Komprehensif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Blitar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 maka ditetapkan tujuan pembangunan OPD. Kemudian berdasarkan tujuan OPD tersebut maka disusunlah sasaran strategis OPD. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah OPD adalah disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	72,77	72,85	72,93	73,01	73,09	
		Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	73,59	73,69	73,79	73,89	73,99	74,09	
			Indeks Kualitas Udara	78,55	78,65	78,75	78,85	78,95	79,05	
			Indeks Kualitas Lahan	60,33	60,33	60,33	60,33	60,33	60,36	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pertamanan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.80	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor SAKIP	70,91	71,01	71,11	71,21	71,31	71,41	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program / kegiatan / sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan pengelolaan RTH publik sebagai daya tarik kota serta Penyiapan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran air, udara dan tanah serta Pengelolaan sampah dan limbah B3	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan persampahan berteknologi tepat guna (3R) dan ramah lingkungan	Pengendalian Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan dan Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS Dalam Penyusunan RPJMD	Arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (LH)" merupakan upaya komprehensif untuk menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negatif bencana, serta penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	
2	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kab. Blitar		Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan	
3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penanggulangan terhadap menurunnya kualitas lingkungan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
4	a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air b. Peraturan Bupati No 36 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pohon c. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2017 tentang Gerakan Blitar Menanam d. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2017 tentang Gerakan Terpadu Kali Bersih		Pemulihan terhadap menurunnya kualitas lingkungan	
5	a. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2017 tentang Gerakan Blitar Menanam b. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2017 tentang Gerakan Terpadu Kali Bersih		Pengendalian alih fungsi lahan	
6	Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air		Peningkatan Kualitas Lingkungan di Sekitar Mata Air dan Tepi Sungai	
7	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup		Pengendalian dan Pengawasan melekat kepada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			
8	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Blitar		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	
9	Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegiat Lingkungan Hidup		Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan.	
10	Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan / atau sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Blitar		Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan	
11	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
12	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati b. Keputusan Bupati Blitar No. 188/388/409.06/KP TS/2017 Tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Desa Sumberagung Kec. Pangungrejo, Kab. Blitar		Pembangunan Taman Kehati di Luar dan Didalam Kawasan Hutan	
13	a. Peraturan Daerah Kab. Blitar No. 10/2011 tentang Pengelolaan Sampah b. Peraturan Bupati Blitar No. 39/2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Peningkatan pelayanan penanganan persampahan	
14	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah		Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat	
15	Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021		Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
16	Peraturan Bupati Blitar No. 39/2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Peningkatan Pembinaan Masyarakat untuk pengurangan timbunan sampah dan pengelolaan sampah Mandiri	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu OPD dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari OPD bersangkutan. Selain itu Program juga merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub kegiatan adalah langkah tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.

Dalam lima tahun kedepan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar merencanakan 10 (sepuluh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan antara lain:

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan			Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Lahan		
			Meningkatnya keselarasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya pengimplementasian dokumen RPPLH	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup yang terselesaikan	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pengimplementasian dokumen KLHS	Persentase dokumen KLHS yang disusun	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase parameter air yang memenuhi baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	Jumlah dokumen yang disusun pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
						Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
						Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Meningkatnya kegiatan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Meningkatnya kegiatan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	Jumlah kegiatan dalam upaya pemulihan lingkungan	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		Persentase Limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
				Meningkatnya limbah B3 yang ditangani	Jumlah Limbah B3 yang terkelola	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
						Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan Sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan asilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya kegiatan / usaha yang memenuhi pengelolaan limbah baik	Jumlah usaha / kegiatan yang taat	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase masyarakat dan / atau SDM bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
						Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup		Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan hidup yang mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten /provinsi/nasional	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
				Meningkatnya peserta lomba pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan yang diberikan	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
						Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup		Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pertamanan			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		
			Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik		Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	Jumlah RTH / Taman Kota / Taman KEHATI yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pengelolaan persampahan		Persentase sampah yang terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	
				Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah sampah yang ditangani	Kegiatan Pengelolaan Sampah	
						Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
						Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	
						Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
						Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Skor SAKIP		
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesekretariatan untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Meningkatnya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase Pengadaan BMD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya jasa penunjang perkantoran	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Lingkungan Hidup															
Program Perencanaa n Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	100	1,049,83 0,000.00	100	750,000, 000.00	100	1,050, 000,00 0.00	100	750,00 0,000. 00	100	750,000, 000.00	100	750,00 0,000. 00	
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ K ota	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup yang terselesaikan	NA	100	380,000, 000.00	100	400,000, 000.00									
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomod ir RPPLH Kabupaten/ Kota	NA	1	380,000, 000.00											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/k ota yang berisi arahan/mua tan RPPLH kabupaten/k ota dan mengakomod ir arahan RPPLH Provinsi	NA			2	400,000, 000.00									
Kegiatan Penyelenggar an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ K ota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	7 dokumen (KLHS RDTR Kanigoro, Srengat, Garum, Sutojayan, Wlingi, KLHS RPJPD, KLHS RPJMD)	90	669,830, 000.00	90	350,000, 000.00	90	1,050,0 00,000. 00	90	750,00 0,000.0 0	90	750,000, 000.00	90	750,00 0,000.0 0	
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJ MD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJ MD Kabupaten/ Kota yang Disusun	2 dokumen (KLHS RPJPD, KLHS RPJMD 2025-2029)											1	200,00 0,000.0 0	
Sub Kegiatan Penyelenggar aan KLHS Rencana	Jumlah Dokumen KLHS Rencana	5 dokumen (KLHS RDTR Kanigoro, Srengat,	3	669,830, 000.00	2	350,000, 000.00	4	1,050,0 00,000.	3	750,00 0,000.0	3	750,000, 000.00	2	550,00 0,000.0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tata Ruang	Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	Garum, Sutojayan, Wlingi)						00		0				0	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter air yang memenuhi baku mutu	35,8	37,7	1,517,720,980.00	39,6	1,532,898,189.80	41,5	1,548,227,171.70	43,4	1,563,709,443.41	45,3	1,579,346,537.85	47,2	1,595,140,003.23	
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	3 (Inventarisasi GRK, IKLH, IKPLHD)	3	158,464,500.00	3	380,000,000.00	3	380,000,000.00	3	385,000,000.00	3	395,000,000.00	3	400,000,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakannya Terhadap Media Tanah, Air,	40	40	91,932,000.00											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dilaksanak an Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Udara, dan Laut														
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanak an	1	1	10,060,0 00.00	1	100,000, 000.00	1	100,00 0,000.0 0	1	100,00 0,000.0 0	1	100,000, 000.00	1	100,00 0,000.0 0	
Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas	1	-		1	55,000,0 00.00	1	55,000, 000.00	1	55,000, 000.00	1	60,000,0 00.00	1	60,000, 000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)														
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1	56,472,500.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				40	125,000,000.00	40	125,000,000.00	40	130,000,000.00	40	135,000,000.00	40	140,000,000.00	
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH	3 (publikasi LH, Sosialisasi, Peringatan HLH)	3	68,262,782.00	3	75,000,000.00	3	75,000,000.00	3	75,000,000.00	3	80,000,000.00	3	85,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakana n	101	50	68,262,7 82.00	60	75,000,0 00.00	75	75,000, 000.00	85	75,000, 000.00	95	80,000,0 00.00	105	85,000, 000.00	
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ K ota	Jumlah kegiatan dalam upaya pemulihan lingkungan	2 (sosialisasi kali bersih, penanaman)	2	1,290,99 3,698.00	2	1,077,89 8,189.80	2	1,093,2 27,171. 70	2	1,103,7 09,443. 41	2	1,104,34 6,537.85	2	1,110,1 40,003. 23	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah	8	3	510,402, 248.00	3	300,000, 000.00	3	300,00 0,000.0 0	3	305,00 0,000.0 0	3	305,000, 000.00	3	305,00 0,000.0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakana n														
Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/k ota yang menjadi kewenangan kabupaten/k ota	11.81	10	780,591, 450.00	10	777,898, 189.80	10	793,22 7,171.7 0	10	798,70 9,443.4 1	10	799,346, 537.85	10	805,14 0,003.2 3	
Program Pengelolaan Keanekarag aman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	Luas perkotaan : 1283 Ha Luas RTH : 7.2 Ha Persentase : 0.56%	0.56	1,824,00 0,000.00	0.64	1,827,77 1,750.00	0.64	1,846, 049,46 7.50	0.72	1,864, 509,96 2.18	0.72	1,883,15 5,061.80	0.80	1,901, 986,61 2.41	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten/ K ota	Jumlah RTH / Taman Kota / Taman KEHATI yang dikelola	4	4	1,824,00 0,000.00	5	1,827,77 1,750.00	5	1,846,0 49,467. 50	6	1,864,5 09,962. 18	6	1,883,15 5,061.80	7	1,901,9 86,612. 41	
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7.2	7.2	1,824,00 0,000.00	8.2	1,627,77 1,750.00	8.2	1,646,0 49,467. 50	9.2	1,664,5 09,962. 18	9.2	1,673,15 5,061.80	10.20	1,681,9 86,612. 41	
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaraga man Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	1	60,000,0 00.00	1	60,000, 000.00	1	60,000, 000.00	1	70,000,0 00.00	1	75,000, 000.00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaraga man Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	2	140,000, 000.00	2	140,00 0,000.0 0	2	140,00 0,000.0 0	2	140,000, 000.00	2	145,00 0,000.0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	-	90	7,062,500.00	91	395,125,000.00	92	449,000,000.00	93	469,000,000.00	94	499,000,000.00	95	519,000,000.00	
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limabah B3	Jumlah Limbah B3 yang terkelola	70,000	71,000	7,062,500.00	72000	395,125,000.00	73000	449,000,000.00	74000	469,000,000.00	75000	499,000,000.00	76,000	519,000,000.00	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25	20	7,062,500.00											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	-									1	70,000,000.00	1	89,000,000.00	
Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan Sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota yang tersedia	-	0	-	0	-	0	-	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	
Sub Kegiatan asilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi				21	395,125,000.00	22	449,000,000.00	20	69,000,000.00	20	29,000,000.00	20	30,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Secara Elektronik (Online Single Submission)														
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	71.57	72	44,173,815.00	73	100,000,000.00	74	105,000,000.00	75	105,000,000.00	76	130,000,000.00	77	130,000,000.00	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah usaha / kegiatan yang taat	73	72	44,173,815.00	73	100,000,000.00	74	105,000,000.00	75	105,000,000.00	76	130,000,000.00	77	130,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Kabupaten/ Kota															
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	OSS : 352, SPPL Non Berusaha : 26, PKPLH : 6, pertek : 12	25	16,750,000.00	25	25,000,000.00	25	30,000,000.00	25	30,000,000.00	25	40,000,000.00	25	40,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	102	100	27,423,815.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	90,000,000.00	100	90,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat dan / atau SDM bidang lingkungan hidup yang ditingkatka n kompetensi nya	NA	90	257,731, 044.00	91	270,617, 596.20	92	284,14 8,476. 01	93	298,35 5,899. 81	94	313,273, 694.80	95	328,93 7,379. 54	
Kegiatan Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ K ota	Jumlah kegiatan pemberdaya an masyarakat yang diselenggara kan	3 (Desa / Kelurahan BESRERI, Kampung Proklm, Sekolah Adiwiyata)	3	257,731, 044.00	3	270,617, 596.20	3	284,14 8,476.0 1	3	298,35 5,899.8 1	3	313,273, 694.80	3	328,93 7,379.5 4	
Sub Kegiatan Pendamping an Gerakan Peduli Lingkungan	Jumlah Pendamping an Pembinaan Gerakan Peduli dan	4	100	22,400,5 00.00	100	90,000,0 00.00	100	95,000, 000.00	100	98,000, 000.00	100	103,000, 000.00	100	108,00 0,000.0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hidup	Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksana n														
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	3,209	1200	13,120,544.00	1300	90,000,000.00	1350	95,000,000.00	1400	98,000,000.00	1450	103,000,000.00	1500	108,000,000.00	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lemb aga masyarakat/	Jumlah lembaga pendidikan formal/lemb aga masyarakat/ komunitas/k elompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensin ya terkait	16	20	222,210,000.00	20	90,617,596.20	20	94,148,476.01	20	102,355,899.81	20	107,273,694.80	20	112,937,379.54	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
komunitas/k elompok masyarakat	PPLH														
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat /perseorangan peduli lingkungan hidup yang mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten/ provinsi/ nasional	NA	1	16,300,000.00	1	25,000,000.00	1	30,000,000.00	1	45,000,000.00	1	48,000,000.00	1	50,000,000.00	
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan	3	3	16,300,000.00	3	25,000,000.00	3	30,000,000.00	3	45,000,000.00	3	48,000,000.00	3	50,000,000.00	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia	1	1	16,300,000.00	1	25,000,000.00	1	30,000,000.00	1	45,000,000.00	1	48,000,000.00	1	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Usaha/Duni a Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pendidikan/ Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH														
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penyelesaia n sengketa / kasus tindak pidana	100	100	20,075,0 00.00	100	50,000,0 00.00	100	50,000 ,000.0 0	100	50,000 ,000.0 0	100	75,000,0 00.00	100	75,000 ,000.0 0	
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ K ota	Prosentase pengaduan yang ditindaklanju ti	100	100	20,075,0 00.00	100	50,000,0 00.00	100	50,000, 000.00	100	50,000, 000.00	100	75,000,0 00.00	100	75,000, 000.00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalaha n Pencemaran dan	Jumlah pengaduan permasalaha n Pencemaran dan Perusakan	10	20	20,075,0 00.00	20	50,000,0 00.00	20	50,000, 000.00	20	50,000, 000.00	20	75,000,0 00.00	20	75,000, 000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani														
Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	58.50	58.6	2,209,406,512.00	58.7	2,231,500,576.13	58.8	2,253,815,581.89	59.9	2,276,353,737.71	60.0	2,299,117,275.09	60.1	2,322,108,447.84	
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang ditangani	81,603.56	81700	2,209,406,512.00	81800	2,231,500,576.13	81900	2,253,815,581.89	82000	2,276,353,737.71	82100	2,299,117,275.09	82,200	2,322,108,447.84	
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	165 Bank Sampah; Kelompok yang dibina : 3 kelompok	3	331,676,200.00	3	450,000,000.00	3	450,000,000.00	3	450,000,000.00	3	455,000,000.00	3	455,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	139	140	1,586,97	142	806,500,	145	818,815,581.8	148	836,353,737.7	150	849,117,	152	867,108,447.8	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prasarana Pengelolaan Persampaha n di TPA/TPST/S PA Kabupaten/ Kota	Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpula n, Pengangkuta n, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			3,948.00		576.13		9		1		275.09		4	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/k ota yang disusun dan ditetapkan	-	1	150,000, 000.00											
Sub Kegiatan Pengoperasia n dan Pemeliharaa n sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	139	-		142	800,000, 000.00	144	810,00 0,000.0 0	146	815,00 0,000.0 0	148	820,000, 000.00	150	825,00 0,000.0 0	
Sub Kegiatan Penanganan sampah	Jumlah sampah yang tertangani	76,293.03	76300	12,111,5	76350	25,000,0	76400	25,000,	76450	25,000,	76500	25,000,0	76,550	25,000,	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
melalui pengangkuta n	melalui proses pengangkuta n			82.00		00.00		000.00		000.00		00.00		000.00	
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpula n sampah	Persentase luas layanan pengumpula n sampah	50.12	50.2	40,431,5 82.00	50.3	50,000,0 00.00	50.4	50,000, 000.00	50.5	50,000, 000.00	50.6	50,000,0 00.00	50.7	50,000, 000.00	
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposa n, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposa n, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	5,310.53	5315	44,230,0 00.00	5345	50,000,0 00.00	5375	50,000, 000.00	5405	50,000, 000.00	5435	50,000,0 00.00	5,465	50,000, 000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
perundangan	perundangan														
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/k ota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/k ota atau TPA/TPST Regional	76,293.03	76300	43,983,2 00.00	76350	50,000,0 00.00	76400	50,000, 000.00	76450	50,000, 000.00	76500	50,000,0 00.00	76,550	50,000, 000.00	
Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	NA	80	9,325,43 9,701.00	82	9,418,69 4,098.01	84	9,512, 881,03 8.99	86	9,608, 009,84 9.38	88	9,704,08 9,947.87	90	9,801, 130,84 7.35	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja yang disusun	11	12	3,778,60 0.00	11	6,778,60 0.00	11	6,778,6 00.00	11	6,778,6 00.00	11	6,778,60 0.00	11	6,778,6 00.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 (Renja, Renja P, RKA, RKAP)	5	1,787,10 0.00	4	1,787,10 0.00	4	1,787,1 00.00	4	1,787,1 00.00	4	1,787,10 0.00	4	1,787,1 00.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perangkat Daerah	Daerah														
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 (LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan TW 1, Laporan TW 2, Laporan TW 3, Laporan TW 4)	7	1,991,50 0.00	7	1,991,50 0.00	7	1,991,5 00.00	7	1,991,5 00.00	7	1,991,50 0.00	7	1,991,5 00.00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	0	-	1	1,500,00 0.00	1	1,500,0 00.00	1	1,500,0 00.00	1	1,500,00 0.00	1	1,500,0 00.00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	0	-	50	1,500,00 0.00	50	1,500,0 00.00	50	1,500,0 00.00	50	1,500,00 0.00	50	1,500,0 00.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang	1	1	4,070,34 1,295.00	1	5,160,59 5,692.01	1	5,210,5 95,692.01	1	5,300,5 95,692.01	1	5,383,66 7,781.01	1	5,465,7 08,680.49	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	tepat waktu														
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	73	4,043,82 3,973.00	73	5,134,07 8,370.01	73	5,184,0 78,370. 01	73	5,274,0 78,370. 01	73	5,357,15 0,459.01	73	5,439,1 91,358. 49	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12	12	21,840,0 00.00	12	21,840,0 00.00	12	21,840, 000.00	12	21,840, 000.00	12	21,840,0 00.00	12	21,840, 000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	4,677,32 2.00	4	4,677,32 2.00	4	4,677,3 22.00	4	4,677,3 22.00	4	4,677,32 2.00	4	4,677,3 22.00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33	73	40,000,0 00.00	73	40,000,0 00.00	73	40,000, 000.00	73	40,000, 000.00	73	40,000,0 00.00	73	40,000, 000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33	6	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12	12	304,883,600.00		304,883,600.00		304,883,600.00		304,883,600.00		309,883,600.00		304,883,600.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1,976,200.00	1	1,976,200.00	1	1,976,200.00	1	1,976,200.00	1	1,976,200.00	1	1,976,200.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	35,729,950.00	1	35,729,950.00	1	35,729,950.00	1	35,729,950.00	1	35,729,950.00	1	35,729,950.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan														
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	15,048,0 50.00	1	15,048,0 50.00	1	15,048, 050.00	1	15,048, 050.00	1	15,048,0 50.00	1	15,048, 050.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	8 bulan berlangganan surat kabar	240	1,500,00 0.00	240	1,500,00 0.00	240	1,500,0 00.00	240	1,500,0 00.00	240	1,500,00 0.00	240	1,500,0 00.00	
Sub Kegiatan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	250,629, 400.00	100	250,629, 400.00	100	250,62 9,400.0 0	100	250,62 9,400.0 0	100	255,629, 400.00	100	250,62 9,400.0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD	1	100	24,011,8 00.00	100	24,011,8 00.00	100	68,198, 740.98	100	68,198, 740.98	100	68,198,7 40.98	100	68,198, 740.98	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	-	-			1	20,000, 000.00			1	20,000,0 00.00			
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	3	24,011,8 00.00	2	24,011,8 00.00	2	48,198, 740.98	2	68,198, 740.98	2	48,198,7 40.98	2	68,198, 740.98	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	12	12	3,232,26 7,976.00	12	2,232,26 7,976.00	12	2,232,2 67,976. 00	12	2,232,2 67,976. 00	12	2,232,26 7,976.00	12	2,232,2 67,976. 00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	16,650,0 00.00	12	16,650,0 00.00	12	16,650, 000.00	12	16,650, 000.00	12	16,650,0 00.00	12	16,650, 000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	124,999, 526.00	12	124,999, 526.00	12	124,99 9,526.0 0	12	124,99 9,526.0 0	12	124,999, 526.00	12	124,99 9,526.0 0	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	12	12	12,010,4 50.00	12	12,010,4 50.00	12	12,010, 450.00	12	12,010, 450.00	12	12,010,4 50.00	12	12,010, 450.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3,078,60 8,000.00	12	2,078,60 8,000.00	12	2,078,6 08,000. 00	12	2,078,6 08,000. 00	12	2,078,60 8,000.00	12	2,078,6 08,000. 00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	12	12	1,650,15 6,430.00	12	1,650,15 6,430.00	12	1,650,1 56,430. 00	12	1,655,2 85,240. 39	12	1,663,29 3,249.88	12	1,678,2 93,249. 88	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemerintah n Daerah	Urusan Pemerintah n Daerah														
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan : 64	64	1,521,78 4,430.00	64	1,521,78 4,430.00	65	1,521,7 84,430. 00	66	1,526,9 13,240. 39	67	1,534,92 1,250.88	68	1,544,9 21,250. 88	
Sub Kegiatan Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin : 35 unit	35	53,500,0 00.00	35	53,500,0 00.00	35	53,500, 000.00	35	53,500, 000.00	35	53,500,0 00.00	35	53,500, 000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1	1	74,872,0 00.00	1	74,872,0 00.00	1	74,872, 000.00	1	74,872, 000.00	1	74,871,9 99.00	1	79,871, 999.00	
TOTAL KESELURUHAN				16,271,7 39,552.0 0		16,601,6 07,210.1 4		17,129 ,121,7 36.09		17,029 ,938,8 92.49		17,280,9 82,517.4 1		17,473 ,303,2 90.37	

Sub Kegiatan Prioritas yaitu sub kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Sub Kegiatan prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Berikut Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Penyusunan dokumen RPPLH	Meningkatnya keselarasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
2	Penyusunan dokumen KLHS RDTR dan KLHS RPJMD	Meningkatnya keselarasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
3	Inventarisasi GRK	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
4	Pembinaan Kali Bersih	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
5	Penghijauan lahan kritis	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	
6	Penghijauan mata air dan sempadan sungai	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	
7	Pembangunan RTH / Taman Kota Ex Pasar Kanigoro dan Kademangan	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
8	Pembangunan Taman KEHATI di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan / Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Dalam Kawasan Hutan	
9	Pengawasan kepada	Meningkatnya kepatuhan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
	penanggung jawab usaha terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup	usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10	Peningkatan Gerakan Peduli Lingkungan melalui Desa / Kelurahan BERSERI, Kampung Proklam, dan Sekolah Adiwiyata	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup / Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/k	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			elompok masyarakat	
11	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
12	Optimalisasi program Bank Sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
13	Pembangunan TPS 3R	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Diperlukan koordinasi dengan Dinas PUPR selaku pelaksana pembangunan infrastruktur persampahan
14	Pembangunan TPST di TPA Tegalasri dan TPST Srengat	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Diperlukan koordinasi dengan Dinas PUPR selaku pelaksana pembangunan infrastruktur persampahan
15	Perluasan TPA Tegalasri	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Diperlukan koordinasi dengan Dinas PUPR selaku pelaksana pembangunan infrastruktur persampahan

Selain Sub Kegiatan Prioritas yang tersaji pada Tabel 4.3, Dinas Lingkungan Hidup mendapat penugasan dalam proyek strategis daerah

terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan, Pengembangan Kawasan Wisata, serta Pembangunan Taman KEHATI.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup berupaya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan agar responsif gender.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah hasil kerja yang dapat diukur dari suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Kinerja penyelenggaraan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau organisasi, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau proyek dalam mencapai tujuan strategisnya. IKK membantu mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau urusan pemerintahan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan. IKK membantu mengidentifikasi sejauh mana suatu kegiatan atau urusan pemerintahan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Tujuan:									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72.69	72.77	72.85	72.93	73.01	73.09	
Indikator Sasaran:									
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	73.59	73.69	73.79	73.89	73.99	74.09	
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	78.55	78.65	78.75	78.85	78.95	79.05	
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	60.33	60.33	60.33	60.33	60.33	60.36	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	
6	Skor SAKIP	Nilai	70.91	71.01	71.11	71.21	71.31	71.41	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72.69	72.77	72.85	72.93	73.01	73.09	
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	62.7	63.7	64.7	65.7	66.7	67.7	
3	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	%	4	8	12	16	20	24	
4	Indeks Kualitas Air	Indeks	73.59	73.69	73.79	73.89	73.99	74.09	
5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	78.55	78.65	78.75	78.85	78.95	79.05	
6	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	60.33	60.33	60.33	60.33	60.33	60.36	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang lingkungan hidup. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor X Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan maka seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. Kepala Perangkat Daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2025 - 2029.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				16.601.607.210,14		17.129.121.736,09		17.029.938.892,49		17.280.982.517,41		17.473.303.290,37		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.418.694.098,01		9.512.881.038,99		9.608.009.849,38		9.704.089.947,87		9.801.130.847,35		
Meningkatnya kinerja pelayanan kesekretariatian untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	-	82	9.418.694.098,01	84	9.512.881.038,99	86	9.608.009.849,38	88	9.704.089.947,87	90	9.801.130.847,35	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.778.600,00		6.778.600,00		6.778.600,00		6.778.600,00		6.778.600,00		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1	6.778.600,00	1	6.778.600,00	1	6.778.600,00	1	6.778.600,00	1	6.778.600,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7		7		7		7		7			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.787.100,00		1.787.100,00		1.787.100,00		1.787.100,00		1.787.100,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	1.787.100,00	4	1.787.100,00	4	1.787.100,00	4	1.787.100,00	4	1.787.100,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.991.500,00		1.991.500,00		1.991.500,00		1.991.500,00		1.991.500,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	1.991.500,00	7	1.991.500,00	7	1.991.500,00	7	1.991.500,00	7	1.991.500,00		
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	50	1.500.000,00	50	1.500.000,00	50	1.500.000,00	50	1.500.000,00	50	1.500.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.160.595.692,01		5.210.595.692,01		5.300.595.692,01		5.383.667.781,01		5.465.708.680,49		
Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	5.160.595.692,01	4	5.210.595.692,01	4	5.300.595.692,01	4	5.383.667.781,01	4	5.465.708.680,49		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	73		73		73		73		73			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.134.078.370,01		5.184.078.370,01		5.274.078.370,01		5.357.150.459,01		5.439.191.358,49		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	73	5.134.078.370,01	73	5.184.078.370,01	73	5.274.078.370,01	73	5.357.150.459,01	73	5.439.191.358,49		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.840.000,00		21.840.000,00		21.840.000,00		21.840.000,00		21.840.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	21.840.000,00	12	21.840.000,00	12	21.840.000,00	12	21.840.000,00	12	21.840.000,00		
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.677.322,00		4.677.322,00		4.677.322,00		4.677.322,00		4.677.322,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	4.677.322,00	4	4.677.322,00	4	4.677.322,00	4	4.677.322,00	4	4.677.322,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				304.883.600,00		304.883.600,00		304.883.600,00		309.883.600,00		309.883.600,00		
Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	240	304.883.600,00	240	304.883.600,00	240	304.883.600,00	240	309.883.600,00	240	309.883.600,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100				100		100		100			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.976.200,00		1.976.200,00		1.976.200,00		1.976.200,00		1.976.200,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.976.200,00	1	1.976.200,00	1	1.976.200,00	1	1.976.200,00		1.976.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.729.950,00		35.729.950,00		35.729.950,00		35.729.950,00		35.729.950,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	35.729.950,00	1	35.729.950,00	1	35.729.950,00	1	35.729.950,00	1	35.729.950,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		-		-		-		-		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-		-		-		-		-		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.048.050,00		15.048.050,00		15.048.050,00		15.048.050,00		15.048.050,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	15.048.050,00	1	15.048.050,00	1	15.048.050,00	1	15.048.050,00	1	15.048.050,00		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	240	1.500.000,00	240	1.500.000,00	240	1.500.000,00	240	1.500.000,00	240	1.500.000,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.629.400,00		250.629.400,00		250.629.400,00		255.629.400,00		255.629.400,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	250.629.400,00	100	250.629.400,00	100	250.629.400,00	100	255.629.400,00	100	255.629.400,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24.011.800,00		68.198.740,98		68.198.740,98		68.198.740,98		68.198.740,98		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2	24.011.800,00	2	68.198.740,98	2	68.198.740,98	2	68.198.740,98	2	68.198.740,98		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			1				1					
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		20.000.000,00		-		20.000.000,00		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1	20.000.000,00		-	1	20.000.000,00		-		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.011.800,00		48.198.740,98		68.198.740,98		48.198.740,98		68.198.740,98		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2	24.011.800,00	2	48.198.740,98	2	68.198.740,98	2	48.198.740,98	2	68.198.740,98		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.232.267.976,00		2.232.267.976,00		2.232.267.976,00		2.232.267.976,00		2.232.267.976,00		
Tersedianya jasa penunjang perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.232.267.976,00	12	2.232.267.976,00	12	2.232.267.976,00	12	2.232.267.976,00	12	2.232.267.976,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12					
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16.650.000,00		16.650.000,00		16.650.000,00		16.650.000,00		16.650.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	16.650.000,00	12	16.650.000,00	12	16.650.000,00	12	16.650.000,00	12	16.650.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.999.526,00		124.999.526,00		124.999.526,00		124.999.526,00		124.999.526,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	124.999.526,00	12	124.999.526,00	12	124.999.526,00	12	124.999.526,00	12	124.999.526,00		
2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.010.450,00		12.010.450,00		12.010.450,00		12.010.450,00		12.010.450,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12.010.450,00	12	12.010.450,00	12	12.010.450,00	12	12.010.450,00	12	12.010.450,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.078.608.000,00		2.078.608.000,00		2.078.608.000,00		2.078.608.000,00		2.078.608.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.078.608.000,00	12	2.078.608.000,00	12	2.078.608.000,00	12	2.078.608.000,00	12	2.078.608.000,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.650.156.430,00		1.650.156.430,00		1.655.285.240,39		1.663.293.249,88		1.678.293.249,88		
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	64	1.650.156.430,00	64	1.650.156.430,00	64	1.655.285.240,39	64	1.663.293.249,88	64	1.678.293.249,88		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35		35		35		35					
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.521.784.430,00		1.521.784.430,00		1.526.913.240,39		1.534.921.250,88		1.544.921.250,88		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	64	1.521.784.430,00	64	1.521.784.430,00	64	1.526.913.240,39	64	1.534.921.250,88	64	1.544.921.250,88		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.500.000,00		53.500.000,00		53.500.000,00		53.500.000,00		53.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	53.500.000,00	35	53.500.000,00	35	53.500.000,00	35	53.500.000,00	35	53.500.000,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.872.000,00		74.872.000,00		74.872.000,00		74.871.999,00		79.871.999,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	74.872.000,00	1	74.872.000,00	1	74.872.000,00	1	74.871.999,00	1	79.871.999,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				750.000.000,00		1.050.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Meningkatnya keselarasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	100	750.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				400.000.000,00		-		-		-		-		
Meningkatnya pengimplementasian dokumen RPPLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		400.000.000,00		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-	2											
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-		-		-		-		-		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				400.000.000,00		-		-		-		-		
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-	2	400.000.000,00		-		-		-		-		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				350.000.000,00		1.050.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Meningkatnya pengimplementasian dokumen KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4	2	350.000.000,00	4	1.050.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	2	750.000.000,00		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1							1					
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				-		-		-		-		200.000.000,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1		-		-		-		-	1	200.000.000,00		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				350.000.000,00		1.050.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		550.000.000,00		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4	2	350.000.000,00	4	1.050.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	2	550.000.000,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.532.898.189,80		1.548.227.171,70		1.563.709.443,41		1.579.346.537,85		1.595.140.003,23		
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter air yang memenuhi baku mutu	35.8	39.6	1.532.898.189,80	41.5	1.548.227.171,70	43.4	1.563.709.443,41	45.3	1.579.346.537,85	47.2	1.595.140.003,23	2.11.1.03.3.28.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				380.000.000,00		380.000.000,00		385.000.000,00		395.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya kegiatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	40		380.000.000,00		380.000.000,00		385.000.000,00		395.000.000,00		400.000.000,00		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	40	40				40				40			
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1	1				1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				-		-		-		-		-		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	40		-		-		-		-		-		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	40	40	125.000.000,00	40	125.000.000,00	40	130.000.000,00	40	135.000.000,00	40	140.000.000,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Meningkatnya kegiatan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lngkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	101	60	75.000.000,00	75	75.000.000,00	85	75.000.000,00	95	80.000.000,00	105	85.000.000,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	101	60	75.000.000,00	75	75.000.000,00	85	75.000.000,00	95	80.000.000,00	105	85.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.077.898.189,80		1.093.227.171,70		1.103.709.443,41		1.104.346.537,85		1.110.140.003,23		
Meningkatnya kegiatan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	11.81	10	1.077.898.189,80	10	1.093.227.171,70	10	1.103.709.443,41	10	1.104.346.537,85	10	1.110.140.003,23		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	3	3		3		3		3		3			
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				300.000.000,00		300.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	3	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	305.000.000,00	3	305.000.000,00	3	305.000.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				777.898.189,80		793.227.171,70		798.709.443,41		799.346.537,85		805.140.003,23		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	11.81	10	777.898.189,80	10	793.227.171,70	10	798.709.443,41	10	799.346.537,85	10	805.140.003,23		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.827.771.750,00		1.846.049.467,50		1.864.509.962,18		1.883.155.061,80		1.901.986.612,41		
Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Persentase RTH	0.56	0.64	1.827.771.750,00	0.72	1.846.049.467,50	0.72	1.864.509.962,18	0.8	1.883.155.061,80	0.8	1.901.986.612,41	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.827.771.750,00		1.846.049.467,50		1.864.509.962,18		1.883.155.061,80		1.901.986.612,41		
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		2	1.827.771.750,00	2	1.846.049.467,50	2	1.864.509.962,18	2	1.883.155.061,80	2	1.901.986.612,41		
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1		1		1		1					
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.2	8.2		8.2		9.2		9.2		10			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.627.771.750,00		1.646.049.467,50		1.664.509.962,18		1.673.155.061,80		1.681.986.612,41		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.2	8.2	1.627.771.750,00	8.2	1.646.049.467,50	9.2	1.664.509.962,18	9.2	1.673.155.061,80	10	1.681.986.612,41		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	145.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				395.125.000,00		449.000.000,00		469.000.000,00		499.000.000,00		519.000.000,00		
Meningkatnya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	-	91	395.125.000,00	92	449.000.000,00	93	469.000.000,00	94	499.000.000,00	95	519.000.000,00	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				395.125.000,00		449.000.000,00		469.000.000,00		499.000.000,00		519.000.000,00		
Meningkatnya limbah B3 yang ditangani	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia			395.125.000,00		449.000.000,00	1	469.000.000,00	1	499.000.000,00	1	519.000.000,00		
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	20	21		22		20		20		20			
	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan						1		1					
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				-		-		-		70.000.000,00		89.000.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan			-		-		-	1	70.000.000,00	1	89.000.000,00		
2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				-		-		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia			-		-	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				395.125.000,00		449.000.000,00		69.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	20	21	395.125.000,00	22	449.000.000,00	20	69.000.000,00	20	29.000.000,00	20	30.000.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	71.57	73	100.000.000,00	74	105.000.000,00	75	105.000.000,00	76	130.000.000,00	77	130.000.000,00	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Meningkatnya kegiatan / usaha yang memenuhi pengelolaan limbah baik	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	26	25	100.000.000,00	25	105.000.000,00	25	105.000.000,00	25	130.000.000,00	25	130.000.000,00		
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	102	100				100		100		100			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	26	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	40.000.000,00	25	40.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	102	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				270.617.596,20		284.148.476,01		298.355.899,81		313.273.694,80		328.937.379,54		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase masyarakat dan / atau SDM bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	-	91	270.617.596,20	92	284.148.476,01	93	298.355.899,81	94	313.273.694,80	95	328.937.379,54	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				270.617.596,20		284.148.476,01		298.355.899,81		313.273.694,80		328.937.379,54						
Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	100	100	270.617.596,20	100	284.148.476,01	100	298.355.899,81	100	313.273.694,80	100	328.937.379,54						
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	3209	1300				1350				1400					1450		1500
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	16	20				20				20					20		20
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				90.000.000,00		95.000.000,00		98.000.000,00		103.000.000,00		108.000.000,00						
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	100	100	90.000.000,00	100	95.000.000,00	100	98.000.000,00	100	103.000.000,00	100	108.000.000,00						
2.11.08.2.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				90.000.000,00		95.000.000,00		98.000.000,00		103.000.000,00		108.000.000,00						
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	3209	1300	90.000.000,00	1350	95.000.000,00	1400	98.000.000,00	1450	103.000.000,00	1500	108.000.000,00						
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				90.617.596,20		94.148.476,01		102.355.899,81		107.273.694,80		112.937.379,54						
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	16	20	90.617.596,20	20	94.148.476,01	20	102.355.899,81	20	107.273.694,80	20	112.937.379,54						
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				25.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00						
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan hidup yang mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten/provinsi/nasional	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	45.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya peserta lomba pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	45.000.000,00	2	48.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				25.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	45.000.000,00	2	48.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				2.231.500.576,13		2.253.815.581,89		2.276.353.737,71		2.299.117.275,09		2.322.108.447,84		
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang terkelola	58.5	58.7	2.231.500.576,13	58.8	2.253.815.581,89	59.9	2.276.353.737,71	60	2.299.117.275,09	60.10	2.322.108.447,84	2.11.1.03.3.28.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				2.231.500.576,13		2.253.815.581,89		2.276.353.737,71		2.299.117.275,09		2.322.108.447,84		
Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	139	142	2.231.500.576,13	144	2.253.815.581,89	146	2.276.353.737,71	148	2.299.117.275,09	150	2.322.108.447,84		
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan													
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	3				3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	76293.03	76350		76400		76450		76500		76550			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5310.53	5345		5375		5405		5435		5465			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	76293.03	76350		76400		76450		76500		76550			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	139	142		144		146		148		150			
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	50.12	50.3		50.4		50.5		50.6		50.7			
	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						450.000.000,00				450.000.000,00			
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	455.000.000,00	3	455.000.000,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				806.500.576,13		818.815.581,89		836.353.737,71		849.117.275,09		867.108.447,84		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	139	142	806.500.576,13	144	818.815.581,89	146	836.353.737,71	148	849.117.275,09	150	867.108.447,84		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				-		-		-		-		-		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			-		-		-		-		-		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				800.000.000,00		810.000.000,00		815.000.000,00		820.000.000,00		825.000.000,00		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	139	142	800.000.000,00	144	810.000.000,00	146	815.000.000,00	148	820.000.000,00	150	825.000.000,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	76293.03	76350	25.000.000,00	76400	25.000.000,00	76450	25.000.000,00	76500	25.000.000,00	76550	25.000.000,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	50.12	50.3	50.000.000,00	50.4	50.000.000,00	50.5	50.000.000,00	50.6	50.000.000,00	50.7	50.000.000,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5310.53	5345	50.000.000,00	5375	50.000.000,00	5405	50.000.000,00	5435	50.000.000,00	5465	50.000.000,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	76293.03	76350	50.000.000,00	76400	50.000.000,00	76450	50.000.000,00	76500	50.000.000,00	76550	50.000.000,00		